

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

##### **1. Sejarah Kota Batam<sup>1</sup>**

Sebelum menjadi daerah otonom, Kotamadya Batam merupakan Kotamadya ke 2 (dua) di Provinsi Riau yang pertama Kotamadya Batam pada mulanya merupakan suatu Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau. Batam adalah nama sebuah pulau terbesar di daerah ini, tetapi tidak jelas diketahui dari mana literatur sejarah masa lampau diwaktu Johor dan Riau masih merupakan Kerajaan Melayu.

Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Tidak ada literatur yang dapat menjadi rujukan dan mana nama Batam itu diambil, yang jelas Pulau Batam merupakan sebuah pulau besar dan 329 pulau yang ada di wilayah Kota Batam. Satu-satunya sumber yang dengan jelas menyebutkan nama Batam dan masih dapat dijumpai sampai saat ini adalah Traktat London (1824). Penduduk asli Kota Batam diperkirakan adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut.

---

<sup>1</sup><https://batam.go.id/profil/sejarah> di akses pada 09/12/2017 pukul 11.00 WIB

Penduduk ini tidak menempati wilayah itu sejak zaman kerajaan Tumasik (sekarang Singapura) dipenghujung tahun 1300 atau awal abad ke-14. Malahan dan catatan lainnya, kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh orang laut sejak tahun 231 M yang di zaman Singapura disebut Pulau Ujung. Pada masa jayanya Kerajaan Malaka, Pulau Batam berada di bawah kekuasaan Laksamana Hang Tuah. Setelah Malaka jatuh, kekuasaan atas kawasan Pulau Batam dipegang oleh Laksamana Hang Nadim yang berkedudukan di Bentan (sekarang P. Bintan). Ketika Hang Nadim menemui ajalnya, pulau ini berada di bawah kekuasaan Sultan Johor sampai pada pertengahan abad ke-18.

Dengan hadirnya kerajaan di Riau Lingga dan terbentuknya jabatan Yang Dipertuan Muda Riau, maka Pulau Batam beserta pulau-pulau lainnya berada di bawah kekuasaan Yang Dipertuan Muda Riau, sampai berakhirnya kerajaan Melayu Riau pada tahun 1911.

Di abad ke-18, persaingan antara Inggris dan Belanda amatlah tajam dalam upaya menguasai perdagangan di perairan Selat Melaka. Bandar Singapura yang maju dengan pesat, menyebabkan Belanda berusaha dengan berbagai cara menguasai perdagangan melayu dan perdagangan lainnya yang lewat di sana. Hal ini mengakibatkan banyak pedagang yang secara sembunyi-sembunyi menyusup ke Singapura.

Pulau Batam yang berdekatan dengan Singapura, amat bermanfaat bagi pedagang-pedagang untuk berlindung dan gangguan patroli Belanda. Pada abad ke-18, Lord Minto dan Raffles dan kerajaan

Inggris melakukan Barter dengan pemerintah Hindia Belanda sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada pemerintah Belanda.

Kota Batam adalah salah satu kotamadya di Provinsi Kepulauan Riau. Pusat kotanya terkenal dengan istilah Batam Center. Kota ini terdiri atas 12 kecamatan. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, namun kini telah berpenduduk 713.960 jiwa. Kota Batam merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis di sebelah utara Indonesia dan terletak di jalur pelayaran internasional.

Batam mulai dikembangkan sejak awal tahun 1970-an sebagai basis logistic dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam.

## **2. Kondisi Geografis Kota Batam<sup>2</sup>**

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, terletak antara: -  
0°25' 29" LU -1°15'00" LU - 103°34' 35" BT -104°26'04"BT.

---

<sup>2</sup><https://batam.go.id/profil/geografis> di akses pada 09/12/2017 pukul 11.34 WIB

Berdasarkan RTRW Kota Batam 2004-2014, Luas wilayah Kota Batam 3.990,00 Km<sup>2</sup>, terdiri dari luas wilayah darat 1.040 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 2.950 km. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan Negara.

Kota Batam berbatasan dengan bagian Utara : Selat Singapura, bagian Selatan : Kecamatan Senayang, bagian Barat : Kecamatan Karimun dan Moro Kabupaten Karimun, bagian Timur : Kecamatan Bintan Utara.

Wilayah Kota Batam seperti halnya Kecamatan-kecamatan di daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan Kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia/ Pulau Singapore di bagian utara sampai dengan pulau-pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian Selatan. Kota Tanjung Pinang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan terletak disebelah timur dan memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam Permukaan tanah di Kota Batam pada umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi disana-sini berbukit-bukit dengan ketinggian maksimum 160 M diatas permukaan laut. Sungai-

sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutan-hutan serta semak belukar yang lebat.

Kota Batam mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2014 berkisar antara 21,4°C – 23,4°C dan suhu maksimum berkisar antara 31,8°C – 34,1°C, sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2014 adalah 26,3°C–28,2°C. Keadaan tekanan udara rata-rata untuk tahun 2014, berkisar antara 1.008,6 mbs – 1.012,0 mb. Sementara kelembaban udara di Kota Batam rata-rata berkisar antara 75– 86 %.

### **3. Kondisi Demografi Kota Batam<sup>3</sup>**

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar baru menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan Nasional hanya bila penduduk yang besar tersebut berkualitas baik. Namun dengan pertumbuhan penduduk yang pesat sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata.

Program kependudukan di Kota Batam seperti halnya di daerah Indonesia lainnya meliputi, pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan.

Sejak Pulau Batam dan beberapa pulau disekitarnya dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi daerah

---

<sup>3</sup><https://batam.go.id/profil/kependudukan> diakses pada 09/12/2017 pukul 11.44 WIB

Industri, Perdagangan, Alih kapal dan Pariwisata serta dengan terbentuknya Kotamadya Batam tanggal 24 Desember 1983, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan dimana dari hasil sensus penduduk rata-rata per tahunnya selama periode 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk Batam rata-rata sebesar 8,1persen.

Penduduk Kota Batam berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2015 tercatat sebesar 1.037.187 jiwa terdiri atas 638.404 jiwa laki-laki dan 197.247 jiwa perempuan dengan sex ratio 106,59. Dari jumlah penduduk tersebut tersebar di dua belas kecamatan dan 64 kelurahan. Hanya penyebarannya tidak merata sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup> di daerah ini bervariasi.

#### **4. Data Pemeluk Agama<sup>4</sup>**

Islam adalah agama mayoritas di Kota Batam, dengan jumlah penganut sebanyak 71.32% dari 1.038.849 jiwa penduduk kota (2017). Diikuti oleh penganut Kristen Protestan (18.35%), Budha (6.78%), Katolik 3.33%, Hindu 0.07%, Konghucu 0.10%. Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota, berdekatan dengan alun-alun, kantor wali kota dan kantor DPRD menjadi simbol masyarakat Batam yang agamis. Agama Kristen Protestan dan Katolik banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari Suku Batak, Ambon , Minahasa, Flores dan Tionghoa. Agama Buddha kebanyakan dianut oleh warga

---

<sup>4</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Batam#Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam#Agama) di akses pada 09/12/2017 pukul 11.49

Tionghoa. Batam memiliki Vihara yang konon terbesar di Asia Tenggara, yaitu Vihara Duta Maitreya.

## 5. Visi dan Misi Kota Batam

Adapun visi dari Kota Batam adalah “*Terwujudnya Kota Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional*”. Hal tersebut memberikan pemahaman sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Kota Batam sebagai Kota yang akan berkembang dengan pesat di masa mendatang yaitu Kota yang dapat disejajarkan dengan kota besar lainnya. Letak dan posisi yang strategis maupun daya dukung yang merupakan salah satu alternatif penetapan Kota Batam sebagai Bandar dunia.
- b. Bandar dunia bermakna pengembangan dan pembangunan Kota Batam diarahkan sebagai Kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapalyang kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis domestik dan manca negara. Dalam jangka panjang, pengembangan Kota Batam diupayakan menjadi sebuah kata jasa yang merupakan “*center of excellent*”, dengan lebih melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi awal kewilayahan, sebagai sebuah kota dagang, Kota pariwisata dan Kota alih kapal serta Kota industri yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang. “Terwujudnya

---

<sup>5</sup><https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/bapeda/profil/visi-dan-misi/index.html> di akses pada 10/12/2017 pukul 09:23

Batam menuju Bandar Dunia yang Madani dan menjadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.

- c. Madani dalam pengertiannya merupakan masyarakat yang sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*), dimana masyarakat tersebut dalam menghadapi berbagai permasalahan baik yang rumit maupun yang mudah selalu dihadapi dengan sopan santun dan beradab serta dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah.
- d. Pilar/tiang pranata yang harus dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat madani adalah meliputi peranan ulama atau ahli ilmu yang konsisten, umaroh yang mengemban kepemimpinan, pelaku perekonomian masyarakat, pekerja dan rakyat yang loyal.
- e. Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Nasional artinya Kota Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bertumpu pada keunggulan komparatif sebagai kota perdagangan dan jasa, hendaknya memiliki daya saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari kepentingan nasional dan internasional.
- f. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional nantinya, diharapkan Kota Batam akan memiliki masyarakat yang sejahtera kehidupannya, sumber daya manusia dan generasi muda yang cerdas dan sehat, berbudaya, agamis, berakhlak mulia yang mampu menghadapi kemajuan zaman dan era globalisasi.

Adapun misi Kota Batam adalah:<sup>6</sup>

- a. Mengembangkan Kota Batam sebagai Kota pusat kegiatan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dan alih kapal yang mempunyai akses ke pasar global dalam suatu sistem tata ruang terpadu yang didukung oleh infrastruktur, sistem transportasi, sistem Teknologi Informasi (IT) dan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi dan investasi yang didukung oleh iklim/situasi usaha yang kondusif berlandaskan supremasi hukum.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat hinterland dan masyarakat miskin melalui penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan pembinaan usaha sektor informal serta penanggulangan masalah sosial.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta pembinaan kepemudaan dan olahraga.

---

<sup>6</sup><http://www.kangdadang.com/visi-dan-misi-lambang-pemerintahan-geografis-kota-batam/>  
di akses pada 10/12/2017 pukul 09:26

- e. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya Melayu dan budaya daerah lainnya serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berbudi pekerti.

## **B. Profil Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Batam**

### **1. Sejarah Berdirinya FKUB Kota Batam<sup>7</sup>**

Forum kerukunan umat beragama (FKUB) adalah suatu wadah untuk menghimpun para pemuka agama yang akan menjadi tempat dimusyawarakannya berbagai masalah keagamaan dan akan dicarikan jalan keluarnya. Sekitar tahun 1995 atas inisiatif para tokoh-tokoh agama dan majelis-majelis agama yang difasilitasi oleh Departemen Agama Kota Batam memulai untuk melakukan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat atau lintas agama.

Atas kesepakatan bersama para tokoh ini membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Forum Komunikasi Umat Beragama Kodya Batam. Pada waktu itu, organisasi ini belum terbentuk struktur secara esmi, hanya berupa kepanitiaan untuk menyelenggarakan kegiatan bhakti sosial.

Pada tanggal 29 September 1999 bertempat di Hotel Mandarin Regency diadakan pelantikan organisasi kerukunan umat beragama yang namanya sepakat diganti dari Forum Komunikasi Umat Beragama

---

<sup>7</sup>Dokumen Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam tahun 2017

Kodya Batam menjadi Forum Musyawarah Umat Beragama Kota Batam.

Pada tahun 2006 setelah terbitnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.9 dan 8 tahun 2006, FMUB melaksanakan MUBES yang dilaksanakan pada bulan Juli 2006 di hotel Nagoya plaza Batam. Pada acara itu, telah disepakati bahwa adanya perubahan nama dan struktur kepengurusan sesuai dengan PBM hanya berjumlah 17 orang sesuai dengan komposisi jumlah penduduk. Selanjutnya namanya berubah menjadi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam disingkat menjadi FKUB Kota Batam dengan struktur satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan sisanya sebagai anggota.

FKUB ini akan bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. FKUB bukan dibentuk oleh pemerintah tetapi dibentuk oleh masyarakat difasilitasi pemerintah yaitu Bupati, Kemenag, Kesbangpol, majelis ulama, serta tokoh-tokoh agama dan kemudian muncullah nama-nama pengurus FKUB setelah muncul nama-nama pengurus kemudian bupati membuat SK.

## 2. Struktur Organisasi FKUB Kota Batam<sup>8</sup>

Organisasi sebagai suatu proses kerjasama diantara orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan, perlu disusun struktur organisasi agar ada kejelasan atas jalan yang hendak ditempuh yang pada gilirannya akan menghasilkan kesatuan tindakan, juga agar ada kesatuan komando melalui mana jelas tergambar. Siapa yang mempunyai wewenang memberikan perintah kepada siapa, serta agar tidak terjadi tumpang tindih dalam wewenang dan tanggung jawab.

FKUB yang bersifat kemasyarakatan kekeluargaan dan keagamaan dalam usaha untuk mewujudkan tujuan organisasi telah membentuk pengurus. Adapun susunan pengurusnya sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Dr. Ir. H. Chablullah Wibisono, MM	Ketua
2	Dr. ampuan Situmeang, SH., M.Hum	Wakil Ketua I
3	M. Effendy Asmawi, MA	Wakil Ketua II
4	Khairuddin Nasution, B. Ac., SE	Sekretaris
5	PMY. Suwarno, ST., MM	Wakil Sekretaris
6	Ir. Bastoni Solichin, M.Hum	Bendahara I

<sup>8</sup>Dokumen Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam tahun 2017

7	Riama Manurung, SH., MH	Bendahara II
8	Pastor Laurensius Dihe Sanga, S.Ag., M.Hum	Komisi Kerukunan
9	Pdt.Drs. Sumargono Hutagalung, MA	Komisi Kerukunan
10	Drs. H. Khudri Syam., MSi	Komisi Kerukunan
11	Tantimin, SH., MH	Komisi Rumah Ibadah
12	Drs. Shabirun Husnum	Komisi Rumah Ibadah
13	Perwira Gatra, SE., MM	Komisi Rumah Ibadah
14	Dr. Drs. I Wayan Catra Yasa, M.M	Komisi Penyiaran
15	H. Bakhtiar M. RUM, Lc. MA	Komisi Penyiaran
16	Agus Lukman Hakim, S.Pdi	Komisi Penyiaran

Tabel 1.1 Struktur Kepengurusan FKUB Kota Batam Tahun 2017

### C. Peran FKUB dalam Membangun Budaya Toleransi

Dalam paparan data akan memberikan gambaran dari pengumpulan data di lapangan yang akan membahas mengenai peran FKUB dalam membangun budaya toleransi. Dalam penelitian yang telah dilakukan di kantor FKUB Kota Batam dan kantor Kementerian Agama Kota Batam dijelaskan mengenai beberapa hasil jawaban pertanyaan yang dijawab oleh beberapa anggota FKUB dan beberapa penyelenggara umat di Kementerian Agama.

Budaya toleransi di Kota Batam sangat penting keberadaannya, tentunya dalam membangun budaya toleransi tak lepas dari beberapa unsur yang mempunyai peran dalam membangun budaya toleransi tersebut. Dalam salah satu wawancara Bapak Syamsul Ibrahim selaku anggota FKUB Kota Batam, Ia mengatakan:

*“Kita tahu bahwa Kota Batam yang didesign menjadi daerah pengembangan industri, perdagangan, pariwisata dan pelabuhan pada kenyataannya tidak memiliki sumber daya alam dan hanya mengandalkan kegiatan pembangunannya dari sisi letak yang sangat strategis karena bertetangga langsung dengan 2 (dua) Negara niaga Singapura dan Malaysia. Disamping tentunya mengandalkan sumber daya manusia yang diharapkan dapat mengelola segala potensi yang tersedia untuk kelangsungan pembangunan daerah. Karena itulah budaya toleransi menjadi sangat penting di Kota Batam untuk menghindari adanya gesekan dan benturan di masyarakat yang pada akhirnya hanya akan menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.”<sup>9</sup>*

Dari jawaban Bapak Syamsul Ibrahim bahwa keadaan Kota Batam yang merupakan kota industri, perdagangan, pariwisata, dan pelabuhan memancing daya tarik orang-orang untuk mengelola potensi yang ada di Batam, sehingga ini membuat kota Batam menjadi kota yang majemuk penduduknya, dan di khawatirkan terjadinya gesekan-gesekan di masyarakat maka pentingnya membangun budaya toleransi di kota tersebut. Dalam membangun budaya toleransi tentunya dibutuhkan peran FKUB yang dapat mengayomi atau yang dapat membangun budaya toleransi secara efektif. Peran FKUB ini dijelaskan oleh Bapak Syamsul Ibrahim sebagai berikut:

*“Dalam kaitan inilah FKUB Kota Batam sebagai wadah tempat berhimpunnya pemuka agama memiliki peran yang strategis untuk memelihara kerukunan umat beragama. Karena perbedaan agama*

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

*dipercaya dapat menimbulkan gesekan di masyarakat disebabkan adanya perbedaan keyakinan dan kepercayaan. Tetapi sekaligus juga dapat menjadi elemen penting dalam memelihara kerukunan dan perdamaian.”<sup>10</sup>*

Peran FKUB ini sangat dibutuhkan dalam meredam gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat akibat dari perbedaan agama yang tentunya memiliki perbedaan keyakinan dan kerukunan, sehingga peran FKUB menjadi salah satu elemen penting dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kota Batam.

Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Khudri Syam selaku Komisi Kerukunan Umat Beragama Kota Batam

*“Sangat penting sekali, karena Batam terdiri dari multi etnis, multi budaya, multi agama, multi suku, maka peran FKUB itu sangat penting sekali, karena terjadi gesekan antar suku atau agama maka FKUB akan turun tangan, karena ditakutkan akan ada perang suku atau perang fisik”<sup>11</sup>*

Melihat pernyataan tersebut timbul pertanyaan, *“Pendekatan apa saja yang dilakukan FKUB dalam membangun budaya toleransi?”* Berikut jawaban dari bapak Syamsul Ibrahim:

*“Ada 2 entitas yang memegang peranan penting dalam membangun budaya toleransi di masyarakat. Pertama agama dan kedua adat. Sehingga membangun budaya toleransi di suatu daerah tidak bisa tidak harus juga menggunakan pendekatan kedua hal itu, yakni agama dan adat”<sup>12</sup>*

Dalam hal ini berarti dalam membangun budaya toleransi di Kota Batam dilakukan dengan menggunakan pendekatan agama dan adat yang

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

<sup>12</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

berlaku di Kota Batam yaitu adat melayu, seperti yang disampaikan oleh

Bapak Syamsul Ibrahim:

*“Semua agama meniscayakan diri sebagai juru damai, tidak ada agama yang mengajarkan intoleransi. Islam misalnya mengklaim sebagai agama keselamatan atau agama perdamaian, sesuai dengan arti kata “islam” itu sendiri yang berarti “selamat, pasrah, patuh, damai”. Kristen dan Katholik juga mengklaim bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini untuk bertindak sebagai juru selamat atau juru perdamaian. Demikian pula Hindu, Buddha dan Konghucu yang memiliki doktrin agar setiap orang melakukan kebajikan. Jadi pada semua agama ada titik persamaan bahwa mereka adalah kontra kejahatan dan intoleransi”<sup>13</sup>*

Bapak Syamsul Ibrahim menambahkan:

*“Yang tak kalah pentingnya adalah pendekatan nilai-nilai kearifan lokal (adat) yang menjadi tata nilai yang berkembang di masyarakat dan di jalankan secara turun temurun. Prinsip “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. “masuk kandang kambing ngembik masuk kandang harimau ngaum” merupakan prinsip-prinsip yang hidup di masyarakat Kota Batam yang mengikat setiap warganya. Prinsip inilah yang menjadi modal dasar untuk mengembangkan budaya toleransi di Kota Batam”<sup>14</sup>*

Dalam hal ini FKUB Kota Batam tentunya juga menjalin kerjasama dengan elemen yang memegang peran mengenai adat di Kota Batam, seperti yang disampaikan oleh Bapak Khudri Syam, Ia mengatakan:

*“oh iya, kita harus menghargai kebudayaan melayu, dimana bumi di pijak disitu langit di junjung, jadi FKUB itu payungnya tetap lembaga adat melayu (LAM), jadi di melayu dikenal kental dengan Islam maka FKUB ini dibawah payung LAM, kita mengadakan kerjasama toleransi dengan perundingan, setiap sebulan kita mengadakan pertemuan dengan LAM, selain itu juga menjalin komunikasi lainnya.”<sup>15</sup>*

Selain itu, juga ada beberapa pendekatan yang digunakan FKUB dalam membangun budaya toleransi, seperti pendekatan sosial dan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

<sup>14</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

<sup>15</sup>Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

pendekatan yuridis, seperti yang di paparkan oleh Bapak Khudri Syam, Ia mengatakan:

*“FKUB menggunakan pendekatan sosial dan yuridis yaitu dengan memberikan pemahaman tentang aturan toleransi, misalnya dalam pembangunan rumah ibadah, memberikan pemahaman mengenai aturan pembangunan rumah ibadah, nah ini penting, ketiga pendekatan pendidikan atau diklat, dengan melakukan pelatihan-pelatihan”<sup>16</sup>*

Timbul satu pertanyaan, *“Siapa saja yang berperan penting dalam membangun budaya toleransi di Kota Batam?”*

Bapak Khudri Syam menjawab:

*“Semua komponen, artinya FKUB tidak bisa jalan sendiri. FKUB merupakan salah satu organ untuk pelekak masyarakat, selain FKUB juga masyarakat mempunyai peran penting, kita menanamkan kesadaran pentingnya toleran, yang ketiga peran pemerintah daerah, seperti unsur MUSPIDA atau aparat, terakhir masing-masing paguyuban juga ikut berperan”<sup>17</sup>*

Hal serupa juga di paparkan oleh Bapak Syamsul Ibrahim, Ia mengatakan:

*“Mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadah, maka ada 3 elemen penting yang memiliki peran dalam membangun budaya toleransi. Yaitu : Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat”<sup>18</sup>*

Dalam hal ini, ternyata FKUB tidak berdiri sendiri dalam membangun budaya toleransi di Batam, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah yang dimaksud adalah instansi yang menjalankan urusan di

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

<sup>17</sup>Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

<sup>18</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

bidang agama (Kementerian Agama) dan yang menjalankan urusan di bidang Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Kepolisian).

Sedangkan Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan urusan di bidang perlindungan masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja).

Adapun masyarakat yang dimaksud tidak lain adalah FKUB, para pemuka agama dan pemangku adat.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Eko Prayogo selaku Penyelenggara BIMAS Umat Budha,

*“Kalo Kementrian Agama salah satu motor penggerak dari terwujudnya kerukunan umat beragama khususnya di Kota Batam. Setiap kali ada persoalan apapun mengenai kerukunan umat beragama pimpinan kami di KEMENAG selalu sigap dalam mengantisipasi dalam meredam persoalan ini”<sup>19</sup>*

Bapak Eko Prayogo menambahkan:

*“Sebenarnya kalo wewenang KEMENAG sendiri ya tidak, semua elemen masyarakat mempunyai kepentingan dalam kerukunan. Tadi saya sampaikan bahwa KEMENAG hanya sebagai salah satu motor penggerak artinya tetap kita kerja bersama, antar elemen masyarakat apapun agamanya, namun biasanya yang memprakarsai salah satunya adalah KEMENAG, FKUB, pemerintah daerah bersama-sama untuk menjaga kerukunan umat beragama dalam penyelesaian masalah-masalah keagamaan”<sup>20</sup>*

Pihak Kementerian Agama yang diwakili oleh Penyelenggara BIMAS Budha juga membenarkan bahwa dalam membangun budaya toleransi FKUB tidak jalan sendiri, akan tetapi adanya kerjasama antara 3 elemen tersebut.

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan bapak Eko Prayogo, 6 November 2017

<sup>20</sup>Wawancara dengan bapak Eko Prayogo, 6 November 2017

Dalam membangun budaya toleransi 3 elemen tersebut tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah, dan Pemerintah Daerah juga ikut serta dalam membangun budaya toleransi, karena masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda, sehingga jika bersatu maka akan menghasilkan budaya toleransi yang efektif di Kota Batam.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Khudri Syam selaku Komisi Kerukunan Umat Beragama Kota Batam mengenai keadaan budaya toleransi di Kota Batam saat ini, Ia mengatakan:

*“Bagus, Alhamdulillah bagus kok, dengan berperannya FKUB dan pemerintah daerah sampai hari ini kita belum menemukan peristiwa-peristiwa yang dapat merusak kerukunan dan kebersamaan. Kalaupun ada peristiwa-peristiwa itu bukan karna faktor agama atau suku, tetapi criminal, seperti pencurian. Batam termasuk kota terbaik di Indonesia masalah kerukunan umat beragama nya”<sup>21</sup>*

Tanggapan Bapak Syamsul Ibrahim pun senada dengan pernyataan

Bapak Khudri Syam:

*“Toleransi dan harmonisasi kehidupan masyarakat di Kota Batam saat ini berjalan dengan sangat baik. Antar anggota masyarakat dari berbagai latar belakang perbedaan etnis, budaya, agama dan status sosial dapat hidup berdampingan tanpa adanya gesekan dan benturan yang mengarah kepada konflik SARA. Jikapun ada gangguan keamanan hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh adanya ketidakpastian hukum, seperti masalah UMK yang memicu aksi buruh dan sengketa perburuhan antara pengusaha dan pekerja. Jadi bukan di dasari oleh tendensi karena adanya sikap atau budaya intoleransi”<sup>22</sup>*

Jawaban dari kedua narasumber menegaskan bahwa kondisi toleransi di Kota Batam saat ini dapat dikatakan sangat bagus, hal ini tentunya tak lepas dari kerjasama antara 3 elemen yang telah dipaparkan diatas. Selama

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

<sup>22</sup>Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

ini di Kota Batam belum ada terdengar isu-isu yang muncul di muka publik yang mengarah pada konflik SARA, walaupun ada konflik-konflik yang terjadi biasanya muncul karena kasus-kasus criminal ataupun aksi-aksi buruh yang berujung brutal. Selain itu, hal tersebut juga nilai oleh Kementerian Agama yang diwakili oleh penyelenggara BIMAS Hindu yaitu Bapak Eko Prasetyo, Ia mengatakan bahwa:

*“Secara umum, kita tidak menutup kemungkinan konflik itu ada, tapi itu dengan cepat diatasi oleh aparat dan tokoh agama seperti suatu waktu yang tidak bisa saya ceritakan disini, FKUB, walikota langsung menurunkan tim untuk meredam. Masalah tersebut tidak sampai meluas, misalnya masalah pendirian rumah ibadah, karena jika ingin mendirikan rumah ibadah maka paling tidak harus mengumpulkan 60 KTP, jika tidak ya tidak bisa mendirikan rumah ibadah”<sup>23</sup>*

Dari pemaparan Bapak Eko Prasetyo menegaskan bahwa di Kota Batam juga terdapat konflik-konflik yang terjadi karena intoleransi, akan tetapi karena peran 3 elemen tersebut masalah tersebut tidak sampai meluas, biasanya masalah yang muncul seperti penolakan pembangunan rumah ibadah, karena dalam mendirikan rumah ibadah harus memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu mengumpulkan paling tidak 60 KTP warga sekitar yang turut mendukung pembangunan rumah ibadah tersebut.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Sayuti selaku Pengembang Kerukunan Umat Beragama di KEMENAG Kota Batam, Ia mengatakan bahwa:

*“Toleransi dikota batam sangat bagus antara majelis agama2 sering mengadakan pertemuan bahkan kalau umat Islam berpuasa mereka ikut serta berpuka puasa bersama kemudian ada kegiatan olahraga,*

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak EkoPrasetyo, 6 November 2017

*mereka majelis agama2 mengutus untuk berlomba-lomba untuk kepentingan agama, kemudian kalau ada masalah mereka ikut serta turun menyelesaikan masalah2 yg ada di Batam, Batam cukup banyak masalah untuk yg kecil2 ya tetapi tak berkembang artinya masalah2 tu bisa diselesaikan dengan secepatnya, tidak berkembang karena juga mereka masyarakat di Batam sibuk dengan pekerjaan namun ada juga diantaranya itu karena memang pemahaman tentang pendirian rumah ibadah itu ada yang belum paham, ada yang belum mengerti tentang hak2 warga negara Indonesia beragama, ada yang masih ya tapi masih bisa diselesaikan dengan baik oleh tokoh2 agama serta pemerintah”<sup>24</sup>*

Dari pernyataan beberapa narasumber di atas muncul pertanyaan

*“Adakah hambatan-hambatan yang dialami oleh FKUB dalam membangun budaya toleransi di Kota Batam?”*

Bapak Syamsul Ibrahim menjawab:

*“Secara umum sikap toleran menjadi budaya yang berkembang pada masyarakat Kota Batam. Namun demikian tidak berarti bahwa persoalan-persoalan keagamaan yang memicu adanya gesekan di masyarakat tidak ada sama sekali. Masalah-masalah yang acap muncul ke permukaan adalah yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Hal ini dipicu oleh penentuan tata ruang wilayah yang berkaitan dengan fasilitas sosial yang belum menggambarkan kondisi ideal sehingga acapkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya berkembang menjadi sikap reaktif masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah”<sup>25</sup>*

Hambatan-hambatan yang dialami oleh FKUB ternyata salah satunya karena hal yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, yang dipicu oleh tata ruang wilayah yang berkaitan dengan fasilitas sosial, sehingga seringkali muncul rasa cemburu antara umat satu dan lainnya. Selain itu, hambatan yang dialami oleh FKUB dalam membangun budaya toleransi

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan bapak Sayuti , 9 November 2017

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

yaitu masalah finansial seperti yang dipaparkan oleh Bapak Khudri Syam, Ia mengatakan bahwa:

*“Sepertinya tidak ada hambatan, karena elemen masyarakat welcome, dan pemerintah juga mendukung, Cuma dari segi finansial saja FKUB tersendat-sendat dalam bekerja, karena mungkin kondisi APBD kita yang minus, sehingga untuk melaksanakan rapat harus iuran terlebih dahulu. Sebenarnya FKUB sendiri kan membantu pemerintah daerah, doakan saja FKUB di bantu oleh pemerintah dalam hal finansial, walaupun selama ini ya sudah ada bantuannya tetapi pihak FKUB menginginkan sesuatu yang lebih, karena kalau kota kita aman kan yang nyaman kita bersama”<sup>26</sup>*

Dilihat dari jawaban dua narasumber diatas mengenai hambatan-hambatan yang dialami dalam membangun budaya toleransi di Kota Batam tidak ada masalah yang cukup signifikan yang dialami FKUB Kota Batam.

#### **D. Peran FKUB dalam Menyelesaikan Kasus Intoleransi**

Keadaan kota Batam yang multi etnis, multi agama tidak menutup kemungkinan dapat memunculkan gesekan-gesekan di masyarakat, baik antara intern umat beragama maupun antara umat beragama satu dan umat beragama lainnya. Seperti dalam wawancara dengan Bapak Syamsul Ibrahim selaku anggota FKUB Kota Batam mengatakan:

*“Potensi konflik antarumat beragama adalah suatu hal yang mungkin terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah karena adanya subyektifitas dari setiap agama yang mengklaim sebagai pihak pembawa kebenaran dan keselamatan bagi manusia. Sehingga setiap pemeluk agama merasa berkewajiban untuk mengajak orang lain kepada agamanya dengan alasan yang sama yakni untuk menyampaikan kebenaran dan untuk keselamatan”<sup>27</sup>*

Dari jawaban Bapak Syamsul Bahri diatas menjelaskan bahwa karena keadaan kota Batam yang terdiri dari berbagai Agama, maka salah satu

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

<sup>27</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

konflik yang dapat muncul yaitu mengenai pengklaiman setiap agama sebagai agama yang membawa kebenaran, sehingga setiap pemeluk agama tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran dengan mengajak orang lain kepada agamanya. Walaupun di Batam telah ada kesepakatan mengenai hal tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terbendung karena salah satu faktornya yaitu teknologi yang semakin canggih, seperti yang di paparkan oleh Bapak Syamsul Ibrahim, Ia mengatakan:

*“Di Indonesia dan Kota Batam pada khususnya sudah ada kesepakatan antar pemeluk agama untuk tidak menyebarkan agama masing-masing kepada pemeluk lain yang sudah menganut agama tertentu, akan tetapi di dalam kenyataannya tetap saja terjadi perpindahan agama dari suatu agama kepada agama tertentu. Ini menunjukkan bahwa penyebaran agama kepada pihak lain adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Apalagi dalam era demokratisasi dan liberalisasi kehidupan, ditambah dengan meningkatnya system komunikasi yang berbasis teknologi telah menyebabkan penyebaran agama sudah tidak lagi dapat dibendung sehingga setiap orang menjadi bebas untuk memilih agama mana yang diyakininya. Kebebasan untuk memilih agama itu merupakan hak asasi yang dilindungi undang-undang. Dalam kaitan inilah maka perbedaan agama sejatinya tetap akan menyimpan potensi konflik, kendati agama itu sendiri di adakan dalam rangka terpeliharanya perdamaian”<sup>28</sup>*

Akan tetapi lain halnya yang dipaparkan oleh Bapak Khudri Syam selaku Komisi Kerukunan FKUB Kota Batam, beliau mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Kota Batam tidak serta merta karena beragamnya agama di Batam, akan tetapi konflik yang sering muncul karena kelakuan individu atas kriminalitas. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Khudri Syam, Ia mengatakan:

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

*“Konflik memang ada terjadi di Batam tetapi bukan serta merta karena multi etnis atau agama, tetapi karena memang dasarnya dia nya nakal, misalnya ada pencurian, perampokan, terjadi perkelahian antara grup satu dan lainnya bukan karena suku atau agama, tetapi karena kelompok band misalnya ”<sup>29</sup>*

Konflik yang muncul karena adanya intoleransi umat beragama biasanya di Kota Batam hanya berkisar pada masalah pendirian rumah ibadah, hal ini di benarkan oleh Bapak Syamsul Ibrahim, Ia mengatakan:

*“Pada umumnya hal-hal yang acap menjadi pemicu terganggunya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Batam adalah masalah pendirian rumah ibadah ”<sup>30</sup>*

Melihat hal tersebut, timbul pertanyaan, *“Konflik yang seperti apa yang muncul di Kota Batam mengenai masalah pendirian rumah ibadah?”*

Berikut jawaban Bapak Syamsul Ibrahim, Ia mengatakan:

*“Salah satu contoh konflik masalah pendirian rumah ibadah yaitu mengenai Pemberian izin mendirikan gereja HKBP di Bengkong Permai yang terletak di tengah komunitas muslim, yang selanjutnya menimbulkan penolakan dari warga setempat karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Setelah melalui mediasi akhirnya Pemerintah Kota Batam memutuskan gereja yang bersangkutan dipindahkan ke lokasi yang berbeda dengan biaya APBD ”<sup>31</sup>*

Hal tersebut terjadi pada tahun 2007, pada saat itu masyarakat muslim menginginkan gereja tersebut dipindah lokasikan, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Syamsul Ibrahim, Ia mengatakan:

*“Kalau gereja di bengkong permai itu, pertama gereja itu sudah lebih dulu dibangun dan sekitarnya masih jarang penduduk, seiring waktu penduduk menjadi ramai disekitarnya dan masyarakat membangun rumah disana dan penduduk sana mayoritas muslim, akhirnya umat islam menghendaki gereja itu di pindahkan karena umat Kristen disana sedikit. Padahal gereja itu sudah mempunyai persyaratan yang*

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

<sup>30</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

<sup>31</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

*lengkap. Akan tetapi lantaran gereja itu berada di daerah pemukiman muslim, umat Islam keberatan, akhirnya di mediasi dan diselesaikan dengan jalan gereja tersebut akan dipindahkan dengan biaya APBD”<sup>32</sup>*

Melihat hal tersebut lalu timbul pertanyaan, apakah gereja tidak dapat berdiri ditengah-tengah pemukiman muslim?

Berikut jawaban Bapak Syamsul Ibrahim, Ia memaparkan:

*“kalau kita melihat kepada peraturan perdana menteri, harusnya seperti itu, bahwa berdirinya suatu rumah ibadah harus ada penggunaannya atau jamaahnya, minimal 90 orang, nah gereja bengkong permai itu kan pecahan dari gereja sukaramai, karena gereja sukaramai itu sudah sembahyang tiga shift, nah jadi tidak bisa menampung lagi umat Kristen yang mnjadi jamaah di gereja tersebut, nah maka dapatlah lokasi di bengkong permai, pada waktu itu kan lokasi tersebut masih belum ada rumah, masih rawa-rawa, kemudian dibangun gereja tersebut disitu, awalnya terdapat beberapa rumah disana setelah gereja itu ada, dan tidak ada masalah, nah sosialisasinya berjalan baik, kemudian belakangan lokasi itu ramai penduduk, tapi yang banyak muslim, jadi dari aspek peraturan perdana menteri pada akhirnya tidak lagi terpenuhi persyaratannya, karena masyarakat muslim yang bertempat disekitar situ lebih banyak, dan umat Kristen Sukaramai situ juga bukan penduduk setempat mereka hanya menjadi jamaah gereja tersebut, karena umat Kristen didaerah situ sedikit”<sup>33</sup>*

Masalah pembangunan rumah ibadah juga pernah terjadi dalam mendirikan masjid di bukit surya Kota Batam. Adapun kronologinya menurut Bapak Syamsul Ibrahim adalah mulanya suatu lahan yang diberikan oleh developer untuk sarana pendidikan yang berubah menjadi bangunan sarana peribadatan untuk kaum muslim. Seperti yang Ia paparkan:

*“Pertama gini, developer itu menyediakan sarana pendidikan, jadi karena sarana pendidikan, pembeli rumah yang kebetulan orang Kristen itu yang terletak disebelah pasung sarana pendidikan, tapi*

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

<sup>33</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

*dalam perjalanannya setelah perumahan di bukit surya itu jadi umat Islam disana itu menginginkan sarana ibadah. Lalu disepakati lah membangun masjid, nah karena pasung itu belum disetujui sebagai masjid jadi mereka solat dengan keadaan darurat dahulu yaitu dengan meminjam tanah perusahaan untuk membangun area darurat untuk solat berjamaah. Setelah itu warga muslim beramai-ramai menandatangani kesepakatan untuk membangun masjid, akhirnya mereka membangun masjid, kemudian orang Kristen yang sudah terlanjur membeli rumah disitu keberatan, kemudian melapor ke polisi, bahwa ada pembangunan masjid yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak developer, kemudian di atasi oleh polres dan akhirnya selesai”<sup>34</sup>*

Melihat hal tersebut, lalu timbul pertanyaan *bagaimana peran FKUB dalam mengatasi hal tersebut?*

Berikut jawaban bapak Syamsul Ibrahim, Ia mengatakan:

*“Pertama, orang Kristen tersebut di panggil dan disarankan untuk mencari lokasi yang baru untuk pembangunan rumahnya dengan type yang sama, harga yang sama, tapi akhirnya orang Kristen tersebut mengalah, dia juga merasa dengan adanya kehadiran masjid itu merasa terganggu, ketika kami menyarankan untuk pindah dia pun tidak mau. Akan tetapi masjid tetap dibangun karena adanya pasung itu harus didasarkan pada kebutuhan warga setempat, jadi ketika pasung itu diberikan developer maka pasung itu sudah menjadi milik orang banyak, dan orang yang banyak itu yang menentukan pasung itu digunakan untuk apa. Berhubung yang dibutuhkan orang banyak itu masjid, maka yang dibangun itu masjid. Agama lain pun tidak ada yang menuntut pembangun rumah ibadah”<sup>35</sup>*

Adapun mengenai masalah pendirian rumah, bukan berarti satu agama dilarang untuk mendirikan suatu tempat peribadatan, akan tetapi adanya peraturan mengenai pembangunan rumah ibadah seperti yang telah dijelaskan diatas, selain itu adanya pertimbangan-pertimbangan dalam

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

<sup>35</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

memberikan suatu agama untuk mendirikan rumah ibadah, seperti yang diungkap oleh Bapak Khudri Syam, Ia memaparkan:

*“Jika masalah pendirian rumah ibadah, di peraturan bersama menteri no 8 dan 9 kan sudah diatur mengenai tata cara pendirian rumah ibadah, kalo ada umat agama yang mau membangun rumah ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing maka harus mengacu kesana. Aturan itu mengatakan bahwa orang yang mau membangun rumah ibadah itu harus mendapat rekomendasi dari FKUB Kota Batam, setelah itu harus mendapat rekomendasi dari KEMENAG Kota Batam, baru dia mengurus IMP (surat izin pembangunan) dari walikota Batam. Nah kalau tidak ada dia dapat 3 itu maka dia tidak boleh membangun rumah ibadah, bukan berarti kita melarang dia beribadah, jadi itu aturannya. Lalu bagaimana mendirikan rumah ibadah sebelum ada peraturan tersebut? itu bisa di urus kembali, prinsipnya FKUB tidak melarang umat beragama untuk beribadah, tapi mengatur tata cara pendirian rumah ibadah supaya tidak tumpang tindih, yang kedua rumah ibadah itu mempunyai kekuatan hukum tidak gampang digusur, ketiga rumah ibadah tersebut tidak berdiri di tanah yang mayoritas atau minoritas, maksudnya disini yaitu membangun masjid tetapi disitu 100 persen penduduknya Kristen, itu kan tidak pantas, tidak boleh, tetap ada pertimbangan-pertimbangan geografis. Jadi , ada 3 pertimbangan tadi itu yaa”<sup>36</sup>*

Permasalahan mengenai penolakan pendirian rumah ibadah juga terdapat beberapa faktor misalnya pada ketidaksiapan lingkungan sekitar menerima keberadaan rumah ibadah tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Simanjuntak selaku penyelenggara BIMAS Kristen. Ia mengatakan:

*“Banyak faktornya, kalau penolakan itu murni karena pasti ada faktor eksternal, kalau faktor eksternal mungkin bukan dari lingkungan itu sendiri yg saya katakan tadi ketika ada isu dari luar datang akhirnya agak panjang menyelesaikannya, sementara kan dibatam ini lahan2 yg diberikan itu kan resmi dari pemerintah BP batam. Jadi, sebenarnya tidak ada penolakan itu ditolak mentah2 oleh masyarakat karena pemerintah BP yg punya lahan, kuaasa dibatam*

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

*ini, hanya kadang2 masyarakat tidak siap ketika ditempatkan ada dirumah ibadah tertentu di sekitar rumah mereka ”<sup>37</sup>.*

Adapun mengenai penolakan pendirian rumah ibadah menurut Bapak Antonius penyebabnya yaitu dari dalam umat Katolik sendiri, Ia mengatakan bahwa:

*“Memang kalau masalah pembangunan rumah ibadah umat kami susah, dari internal pun kami susah, ada aturan yang harus dipenuhi, sebenarnya awalnya bukan datang dari kami tetapi dari pemerintah sendiri ada aturannya, dan juga dari gereja juga ada aturannya. Misalnya disuatu daerah sudah ada 100 orang, belum tentu pimpinan gereja yang biasa di panggil uskup menyetujui keinginan untuk mendirikan rumah ibadah, jadi yang penentu nya yaitu pimpinan tertinggi gereja di suatu wilayah. Kita harus izin ke uskup jika tidak di izinkan ya susah untuk mendirikan ”<sup>38</sup>*

Dari beberapa paparan narasumber diatas dapat diketahui bahwa penolakan rumah ibadah bukan karena mengenai faktor lingkungan sekitar yang tidak bisa menerima keberadaan rumah ibadah yang akan dibangun, akan tetapi ada beberapa hal yang harus dipenuhi seperti terpenuhinya persyaratan atas ketentuan pemerintah, hal ini dikarenakan agar tidak adanya tumpang tindih dalam pembangunan rumah ibadah, selain itu dalam pendirian rumah ibadah khusus di kalangan umat Katholik bahwa harus adanya persetujuan uskup dalam membangun rumah ibadah, tentunya dalam kalangan umat Katholik mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam pembangunan rumah ibadah.

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan bapak Simanjuntak, 6 November 2017

<sup>38</sup>Wawancara dengan Bapak Antonius, 6 November 2017

Dari paparan diatas maka muncul pertanyaan, “Apasaja faktor-faktor yang memicu timbulnya konflik-konflik akibat dari keberagaman umat beragama di Kota Batam?”

Berikut jawaban dari Bapak Antonius Januarius Rotitola selaku penyelenggara BIMAS Katholik di Kemntrian Agama Kota Batam, Ia mengatakan:

*“Faktor ketidak mengertian, pemahaman yang berbeda karna setiap agama jelas masing-masing berbeda, kurangnya bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengannya sehingga memandang agama lain pun berbeda. Berbeda juga bisa menjadi faktor tidak menghargai satu sama lain”<sup>39</sup>*

Selain itu bukan hanya ada satu faktor itu saja, kurangnya pembinaan atau tidak meratanya pembinaan mengenai toleransi umat beragama antara kecamatan satu dan lainnya, sehingga membuat terpicunya timbul konflik antara umat beragama satu dan lainnya, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Simanjuntak selaku penyelenggara BIMAS Kristen di Kementrian Agama Kota Batam, Ia mengatakan:

*“Masih perlu ada bimbingan dan binaan didaerah2 tertentu, inikan kota batam kan terdiri dari kecamatan, kelurahan dan tidak sama semua orang disetiap lingkungannya harus ada pendekatan2 lebih baik di lingkungan”<sup>40</sup>*

Lain halnya yang diungkapkan oleh Bapak Khudri Syam, bahwa faktor yang memicu timbulnya konflik umat beragama biasanya muncul dari permasalahan individu, seperti kecemburuan sosial, kesenjangan sosial, dan ketidaktahuan mengenai aturan yang berlaku, sehingga biasanya hal yang

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Antonius, 6 November 2017

<sup>40</sup> Wawancara dengan bapak Simanjuntak, 6 November 2017

dimulai dari masalah individu tersebut, ada pihak-pihak yang sering menyeret-nyeret agama yang dianut. Seperti paparan Ia yang mengatakan:

*“Nah yang pertama, mereka merasa tidak diperlakukan secara adil oleh pemerintah, misalnya masalah perizinan suatu kelompok satu diberi izin dan kelompok satunya tidak, maka terjadi kecemburuan sosial, kedua, kesenjangan sosial, berawal dari kesenjangan sosial pribadi, kadang-kadang dimanfaatkan pihak tertentu disangkut pautkan dalam masalah agama. Jadi pada dasarnya dari ranah agama tidak pernah ada tetapi dari masalah sosial kemiskinan digiring oleh beberapa pihak kemasalah agama. Nah inilah yang kita batasi, apapun bentuk criminal yang terjadi di Bata mini jangan sampai diseret ke masalah suku bahkan agama. Itu semua terjadi karena kemiskinan dan ketidakadilan. Yang ketiga yaitu ketidaktahuan dengan aturan yang ada, itu terjadi konflik ditengah masyarakat. Misalnya masalah kumpul kebo, jika tidak diatasi maka akan berujung ke masalah SARA, jika sudah berkembang ke arah itu yang berbahaya, maka itu yang kita cegah FKUB ini, sampai saat ini terjadi gesekan di bawah itu bukan karena SARA atau agama, karena 3 faktor tadi”<sup>41</sup>*

Dari paparan beberapa narasumber diatas lalu muncul pertanyaan lanjutan, “Jika terjadi konflik, pihak-pihak mana saja yang berwenang untuk turun tangan?”

Bapak Syamsul Ibrahim menjawab:

*“Apabila terjadi konflik di masyarakat yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama maka pihak-pihak yang acap terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut adalah Pemerintah Kota Batam, Kepolisian Resort Kota Batam, Kementerian Agama Kota Batam, FKUB Kota Batam, Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Majelis-majelis Agama”<sup>42</sup>*

Hal serupa juga di pertegas oleh Bapak Khudri Syam, Ia mengatakan:

*“Kita lihat dulu, kalau masalah sosial, maka FKUB akan bekerjasama dengan dinas sosial, kalau ini masalah criminal seperti pencurian, perjudian, maka kita bekerjasama dengan pihak*

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

<sup>42</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

*kepolisian. Kalau terjadi perkelahian maka yang kita lihat sebab awalnya itu apa, kalau mislanya perjudian, maka yang lebih tepatnya kepolisian yang mengatasi masalah tersebut. Kalau masalah itu bukan wewenang dari FKUB, FKUB hanya mengurus masalah rumah ibadah, FKUB hanya membatasi agar masalah-masalah seperti kesenjangan sosial, kecemburuan sosial tidak berlanjut hingga ke ranah agama”<sup>43</sup>*

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa jika terjadi suatu konflik, maka pihak yang mempunyai peran di dalamnya biasanya tergantung dari akar masalah konflik tersebut, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kasus intoleransi antar umat beragama biasanya tidak murni muncul karena perdebatan agama, akan tetapi muncul karena permasalahan individu, sehingga yang memiliki peran untuk turun tangan adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang terhadap akar masalah tersebut. Melihat hal tersebut, muncul pertanyaan, “Bagaimana peran FKUB dalam menangani kasus konflik-konflik umat beragama?”

Berikut jawaban dari Bapak Syamsul Ibrahim, Ia mengatakan:

*“FKUB dalam hal ini selalu berperan sebagai fasilitator dan mediator sekaligus melaksanakan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait”<sup>44</sup>*

Hal tersebut juga diperjelas oleh Bapak Khudri Syam mengenai peran FKUB mengenai menyelesaikan konflik umat beragama di Kota Batam, seperti dalam menyelesaikan masalah penolakan pendirian rumah ibadah. Ia mengatakan:

*“Peran FKUB dalam menyelesaikan konflik rumah ibadah adalah menyampaikan aturan mengenai peraturan mendirikan rumah ibadah. Peran FKUB disini yaitu memediasi, memfasilitasi, memediator, jadi*

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

<sup>44</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

*kalau ada pembangunan rumah ibadah tanpa sepengetahuan FKUB ini termasuk liar, FKUB turun tangan itu, jadi FKUB itu menjelaskan tentang aturan-aturan pendirian rumah ibadah, inilah peran FKUB. Peran FKUB sebagai mediator itu jika terjadi konflik antar umat Bergama maka FKUB akan memanggil kepala sukunya masing-masing, misalnya antara islam dan Kristen, nah kita panggil pendetanya untuk meredakan umatnya, sepanjang terkait masalah rumah ibadah”<sup>45</sup>*

Dari seluruh paparan diatas dapat dilihat bahwa beberapa konflik-konflik yang terjadi antar umat beragama baik yang terjadi karena penolakan kasus pendirian rumah ibadah maupun karena kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial, sampai saat ini dapat terselesaikan dengan damai, tidak ada ditemukan konflik-konflik antar umat beragama yang terjadi di Kota Batam terjadi hingga ada perang fisik ataupun menuju masalah besar lainnya, tentunya hal ini dapat terjadi karena peran- peran dari beberapa elemen yang terjun langsung dalam menyelesaikan masalah atau konflik tersebut. Ternyata ada keunikan tersendiri dalam penyelesaian kasus intoleransi di Kota Batam, hal ini dipaparkan oleh Bapak Syamsul Ibrahim, Ia mengatakan:

*“Kekhasan yang dilakukan oleh FKUB Kota Batam dalam penyelesaian konflik dan/atau meredam potensi konflik yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan adalah melalui pendekatan kearifan lokal dengan menggandeng Lembaga Adat Melayu selaku pemangku adapt daerah dan Majelis-majelis agama selaku pemangku agama di daerah. Melalui pendekatan adat dan agama inilah setiap potensi konflik bahkan konflik itu sendiri dapat diselesaikan. Hal ini sebagaimana yang diterapkan ketika terjadi konflik etnis antara komunitas Batam dengan Flores di mana penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan adat”<sup>46</sup>*

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

<sup>46</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

Dari paparan diatas dapat kita lihat bahwa kekhasan FKUB dalam menyelesaikan kasus intoleransi karena melalui pendekatan adat. Hal tersebut dengan menggandeng Lembaga Adat Melayu sebagai peredam konflik umat beragama di Kota Batam.

#### **E. Peran FKUB dalam Mempertahankan Toleransi Umat Beragama**

Mengingat Kota Batam merupakan kota yang perekonomiannya ditopang oleh industri, sehingga sangat membutuhkan investor-investor asing, maka mempertahankan toleransi umat beragama sangat dibutuhkan di kota tersebut, karena untuk membuat investor-investor di kota Batam merasa aman sehingga juga berdampak pada perekonomian di kota Batam berjalan dengan lancar. Dalam salah satu wawancara kepada Bapak Eko Prayogo, Ia mengatakan:

*“Saya ingat dengan ucapan pimpinan saya Pak Zulkifli AKA bahwa harga atau nilai suatu kerukunan sangat mahal. Tanpa adanya kerukunan maka kehidupan bermasyarakat tidak akan berjalan dengan baik, ekonomi juga tidak akan berjalan dengan baik. Semua hal tanpa ditopang dengan kondisi yang rukun, kehidupan bermasyarakat tidak berjalan baik. Maka daripada itu, saya nilai yang namanya kerukunan itu sangat-sangat mahal harganya dan penting”<sup>47</sup>*

Dari jawaban Bapak Eko Prayogo diatas dapat diketahui bahwa kerukunan atau toleransi sangat mahal harganya, karena toleransi umat beragama itu yang merupakan modal dasar dari seluruh kehidupan di Kota Batam. Jika toleransi di Kota Batam tetap bertahan maka kondisi ekonomi, sosial, pendidikan di Kota Batam akan berjalan dengan baik tanpa kekhawatiran adanya permusuhan yang dapat menyebabkan kondisi kota

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan bapak Eko Prayogo, 6 November 2017

Batam menjadi berantakan. Hal tersebut senada dengan yang dipaparkan oleh Bapak Antonius Januarius Rotitola, Ia mengatakan:

*“Toleransi itu pasti sangat penting, karena setiap orang tentu ingin hidup damai, rukun dengan sesama kita manusia. Kalo hidup damai bisa bebas melakukan apapun, maksudnya disini yaitu sector kehidupan bisa berjalan dengan baik. Dalam melakukan sesuatu tidak memandang ras, agama”<sup>48</sup>*

Bapak Simanjuntak juga senada dengan paparan kedua narasumber diatas, Ia mengatakan:

*“toleransi ini harus dijunjung tinggi dan dijaga supaya menjadi baik dari sisi keamanan, perekonomian industri di batam kalau toleransi sudah mulai mengalami gangguan kota batam tidak kondusif jadi semua kelompok agama, kelompok masyarakat, dan suku harus menjunjung tinggi toleransi ini bahu membahu dan bahkan sudah harus dimulai sejak dini mulai anak2 kecil harus dibangun sebuah toleransi yang baik antar agama, suku, dan lingkungan. Itu penting , karena kota batam hidup karena adanya industri, tidak ada tambang, tidak ada pertanian, tidak ada yang lain selain industri, jasa dan pariwisata”<sup>49</sup>*

Dari paparan beberapa narasumber diatas membuktikan bahwa mempertahankan toleransi umat beragama di Kota Batam tujuan terbesarnya adalah untuk menjaga perekonomian di Batam, sehingga jika perekonomian berjalan dengan baik, maka keamanan dari kriminalitas sedikit terjaga.

Dalam mempertahankan budaya toleransi masing-masing agama di Kota Batam memiliki strategi tersendiri, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Eko selaku penyelenggara BIMAS Budha, Ia memaparkan:

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak Antonius, 6 November 2017

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Simanjuntak, 6 November 2017

*“Pertama kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada internal umat Budha sendiri. Agama Budha ada beberapa aliran yang masing-masing mempunyai karakteristik dalam beribadah yang berbeda. Pertama disini kita memberikan dahulu pemahaman tentang arti penting persaudaraan, kerukunan bersama, setelah kita mewujudkan persaudaran, kerukunan dalam intern umat Budha, baru kita coba membuka wawasan mereka tentang arti penting rukun dengan orang beda agama”<sup>50</sup>.*

Ia juga menambahkan bahwa:

*“Seperti contoh kehidupan di kompleks perumahan, disitu tidak hanya agama tertentu, biasanya masing-masing mempunyai ciri khas masing-masing. Misalnya orang Tionghoa pada hari-hari tertentu mereka melaksanakan sembahyang di depan rumah, nah itu kita juga memberi pemahaman bahwa hati-hati dengan lingkungan apalagi dengan yang tidak seiman, misalnya kan bakar kertas itu kan akan lari ke tetangga, nah itu kita harus antisipasi. Kemudian ketika kita tinggal di komplek tetangga kita mungkin tradisi ibadahnya berbeda, mungkin dengan nyanyi-nyanyi atau pada hari-hari tertentu mereka berkumpul di samping rumah kita, yah kita harus lapang dada menerima itu semua, nah itu salah satu wujud saling menghargai dan menghormati satu sama lain, nah itu yang kita tekankan kepada kita khususnya umat Budha, sebagai hasilnya kita bisa lihat di Batam*

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan bapak Eko Prayogo, 6 November 2017

*selama ini sepengetahuan saya belum ada namanya kasus umat Budha berkelahi dengan umat beragama lainnya”<sup>51</sup>.*

Umat Hindu juga memiliki cara tersendiri dalam mempertahankan budaya toleransi, seperti yang diungkapkan Bapak Eko Prasetyo, Ia memaparkan:

*“Menjaga hati, menjaga perkataan, dan menjaga perbuatan. Dimulai dengan menjaga hati, jika hati sudah baik maka perkataan dan perbuatan juga ikut berjalan dengan baik, karena perkataan dan perbuatan merupakan cerminan hati. Selain itu jika perbuatan kita sudah baik maka akan berimbas dengan kebiasaan kita menjadi baik, lalu menjadi karakter yang baik, jika karakter menjadi baik maka nasib kita juga menjadi baik. Trik-trik nya saling mengunjungi, misalnya Safari Ramadhan, open house, pawai kerukunan, dll”<sup>52</sup>*

Melihat hal tersebut timbul pertanyaan, “Bagaimana FKUB menyikapinya?” Berikut jawaban dari Bapak Syamsul Ibrahim mengenai hal tersebut, Ia memaparkan:

*“FKUB boleh dibilang adalah garda terdepan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Karena itu FKUB senantiasa melaksanakan dialog-dialog dengan Majelis-majelis agama untuk membangun saling pengertian dan toleransi antarumat beragama. FKUB berkeyakinan jika para pemuka agama sudah dapat mengembangkan budaya toleran maka hal yang sama akan diikuti pula oleh pemeluk agama masing-masing”<sup>53</sup>*

Bapak Khudri Syam juga menambahkan mengenai sikap FKUB dalam melihat hal tersebut, Ia mengatakan:

*“Jadi, di dalam surah al kafirun, Allah sudah menjelaskan, yang artinya katakanlah Muhammad, bahwa kita meyembah apa yang dia sembah, kamu tidak menyembah apa yang ku sembah. Agamaku agamaku dan agamau ya agamamu. Artinya apa, jika menyangkut*

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan bapak Eko Prayogo, 6 November 2017

<sup>52</sup>Wawancara dengan bapak Eko Prasetyo, 6 November 2017

<sup>53</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

*masalah akidah dan ibadah maka kita boleh saling mengganggu, yang namanya toleransi ini kita memberikan kesempatan untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Tidak boleh saling mengganggu. Di luar akidah dan ibadah kita boleh saling bekerjasama seperti dalam hal muamalah, sosial, dll”<sup>54</sup>*

Dari paparan diatas terlihat jelas bahwa dalam mempertahankan toleransi umat beragama di Kota Batam FKUB memberikan contoh agar dapat ditiru oleh pemeluk setiap agama, karena di dalam FKUB itu terdiri dari perwakilan masing-masing dari tokoh agama yang ada di Batam. FKUB memberikan teladan bahwa dalam mempertahankan toleransi umat beragama di Kota Batam kita tidak boleh mengusik antara satu sama lain dalam masalah akidah dan beribadah, biarkan setiap agama menjalankan apa yang dipercayainya, di luar itu FKUB justru menginginkan adanya kerjasama yang baik antara umat beragama satu dan lainnya baik itu masalah sosial, muamalah.

Dalam hal tersebut FKUB sering kali mengadakan kegiatan sosial yang diikuti oleh seluruh umat beragama yang ada di Kota Batam, seperti dalam wawancara kepada Bapak Syamul Ibrahim, Ia mengatakan:

*“Untuk mengembangkan budaya toleransi tersebut maka FKUB acap pula melakukan kunjungan ke rumah ibadat di lintas agama. Serta melaksanakan kegiatan pembauran yang memungkinkan setiap pemeluk agama dapat berinteraksi secara baik. Adapun Pendekatan yang dilakukan antara lain, perkemahan pembauran pemuda lintas agama, perkemahan pelajar lintas agama, pemberian santunan sembako kepada masyarakat miskin di lintas agama, menyelenggarakan seminar, diskusi publik, dan/atau sarasehan dengan topik yang berkaitan dengan kehidupan multicultural, kegiatan donor darah, dsb”<sup>55</sup>*

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

Selain itu ada beberapa cara FKUB dalam mempertahankan toleransi umat beragama di Kota Batam, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Syamsul Ibrahim, Ia mengatakan:

*“Banyak cara yang dilakukan oleh FKUB dalam membangun budaya toleransi dan mengembangkan kerukunan umat beragama, tapi yang paling berkesan dan cukup kuat memberikan pengaruh dalam membangun budaya toleran seperti, memberikan ucapan selama hari raya bagi setiap pemeluk agama, baik melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial, saling berkunjung pada setiap kali perayaan keagamaan untuk mempererat persaudaraan sesama anak bangsa, apabila terjadi perselisihan di antara pemeluk agama maka setiap pemuka agama berperan untuk meredam perselisihan tersebut diinternal agama masing-masing sehingga memudahkan penyelesaiannya”<sup>56</sup>*

Dalam mempertahankan toleransi umat beragama ternyata FKUB juga mengalami hambatan, sebenarnya secara prinsip boleh dibilang tidak ada hambatan yang cukup berarti dalam kaitan pelaksanaan tugas-tugas FKUB Kota Batam di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Umumnya hambatan yang dialami oleh FKUB Kota Batam hanyalah hal-hal yang bersifat teknis, seperti masalah pembiayaan dan belum sinkronnya peran antarinstansi pemerintah di daerah yang berkaitan dengan tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama, selain itu juga keterbatasan waktu juga merupakan hambatan yang dialami oleh FKUB kota Batam. Bapak Khudri Syam mengatakan:

*“Hambatan waktu, kita FKUB ini kan orang yang bekerja sambilan, umumnya pengurus FKUB ini punya kesibukan luar biasa, jadi untuk kumpul turun bekerja harus mengatur waktu, sehingga waktu termasuk hambatan. Kedua, dana, Karena FKUB sendiri tidak mempunyai anggaran tetap, sehingga bergantung kepada pemerintah”<sup>57</sup>*

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

<sup>57</sup>Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

Mengenai hambatan finansial yang dialami oleh FKUB dalam mempertahankan toleransi umat beragama, Bapak Syamsul Ibrahim juga memaparkan hal yang senada, Ia mengatakan:

*“Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan BAB VIII Pasal 26 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 maka biaya pelaksanaan tugas FKUB Kab/Kota akan dibebankan kepada APBD Kab/Kota. Hal yang sama disebutkan pula dalam Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan FKUB Kab/Kota yang menyatakan bahwa belanja pelaksanaan tugas FKUB Kab/Kota dibebankan kepada APBD Kab/Kota. Akan tetapi di dalam perakteknya acapkali Pemerintah Daerah tidak menganggarkan secara khusus pembiayaan FKUB sehingga telah menyulitkan FKUB dalam upaya merealisasikan program-programnya. Hal ini diduga karena belum sinkronnya antar peraturan yang ada. Seperti Peraturan yang berkaitan dengan APBD dengan Peraturan yang berkaitan dengan belanja pemeliharaan kerukunan umat beragama boleh jadi tidak sejalan. Sehingga tidak dengan sendirinya setiap perintah dalam suatu peraturan dapat dijalankan dengan baik”<sup>58</sup>*

Bapak Syamsul Ibrahim juga menambahkan:

*“Hambatan lain yang acap menyita energi adalah masih multi tafsirnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peran dan fungsi FKUB. Sehingga FKUB sulit menempatkan posisinya sebagaimana harusnya. Disamping itu masih terdapat kenyataan bahwa sebagian penyelenggara pemerintahan terutama pada tingkat kecamatan dan kelurahan banyak yang belum memahami substansi peraturan yang berkaitan dengan peran dan fungsi FKUB dalam kaitan pemeliharaan kerukunan umat beragama”<sup>59</sup>*

Dari paparan diatas lalu timbul pertanyaan, *“bagaimana langkah strategis FKUB dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mempertahankan toleransi umat beragama?”* Berikut jawaban Bapak Khudri Syam mengenai hal tersebut, Ia mengatakan:

*“ya pertama, kita harus menyaring siapa saja yang ingin menjadi pengurus FKUB, yaitu orang-orang yang benar-benar mempunyai komitmen tinggi, karena tak jarang ketika sudah masuk menjadi*

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

<sup>59</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

*pengurus FKUB itu diajak berkumpul itu susah, alasan yang bermacam-macam. Sehingga kita membutuhkan masing-masing agama mengirimkan perwakilannya untuk menjadi pengurus FKUB yang benar-benar bisa meluangkan waktunya untuk FKUB, kedua, meminta kepada pemerintah kota batam supaya tidak setengah-setengah membentuk FKUB, karena FKUB disini kan membantu PERDA, bukan untuk pribadi, kalau untuk pribadi kan kita sudah bekerja di tempat lain, kita membantu PERDA agar bagaimana caranya tidak terjadi konflik. Nah karena itu kita minta WAKO untk membantu penganggaran operasional FKUB”<sup>60</sup>*

Mengenai hal tersebut, Bapak Syamsul Ibrahim juga memaparkan mengenai langkah-langkah strategis FKUB dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mempertahankan toleransi umat beragama, Ia mengatakan:

*“Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh FKUB Kota Batam dalam mempertahankan toleransi umat beragama, antara lain, melakukan pemetaan dan identifikasi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan budaya toleransi umat beragama di Kota Batam melalui penelitian dan kajian yang dilakukan oleh kelompok kerja Diklatpim III Kementerian Agama di Kota Batam (2008) sehingga menghasilkan sebuah karya ilmiah yang menggambarkan kondisi obyektif kerukunan umat beragama di Kota Batam. Melalui pemetaan ini kemudian FKUB Kota Batam melakukan langkah-langkah pemecahan masalah, melakukan Rapat Koordinasi dengan DPRD Kota Batam yang melibatkan Pemerintah Kota Batam dan segenap instansi yang menjalankan urusan di bidang yang berhubungan dengan peran, tugas dan fungsi FKUB. Sehingga telah memberikan win-win solusi atas masalah-masalah yang di hadapi dalam kaitan pemeliharaan kecurunan umat beragama dan pengembangan budaya toleransi di Kota Batam, menyusun Proposal Kerja yang akan menjadi acuan bagi FKUB Kota Batam dalam pelaksanaan tugasnya dan sekaligus menjadi bahan penyusunan kebijakan bagi Pemerintah Kota Batam dalam upaya membangun budaya toleransi di Kota Batam, membangun jaringan kerja dengan membentuk organisasi sayap FKUB yang bertujuan menyukseskan tujuan FKUB yakni membentuk Organisasi Forum Pemuda Lintas Agama Kota Batam, Forum Wanita Pembauran Lintas Agama Kota Batam dan Persaudaraan Lintas Agama Kota Batam, mengembangkan Struktur Organisasi FKUB Kota Batam dengan membentuk Komisi-komisi kerja yakni : Komisi Kerukunan, Komisi*

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan bapak Khudri Syam, 9 Desember 2017

*Penyiaran Agama, Komisi Pendirian rumah ibadat dan Komisi Sosial Budaya* <sup>61</sup>

Tujuan dari mempertahankan toleransi umat beragama di kota Batam adalah untuk menjaga stabilnya perekonomian di Batam dengan membuat para investor-investor yang berinvestasi di kota Batam menjadi aman dan nyaman dari konflik-konflik mengenai keagamaan, karena jika terjadi konflik mengenai keagamaan sangat membahayakan bagi kelangsungan seluruh tatanan kehidupan di kota Batam baik dari segi keamanan, pendidikan, dll.

#### **F. Temuan**

1. Temuan terkait dengan peran FKUB dalam membangun budaya toleransi adalah FKUB sebagai wadah tempat berkumpulnya tokoh agama dalam melakukan pembangunan budaya toleransi di Batam. Dalam membangun budaya toleransi, FKUB Kota Batam sendiri menggunakan pendidikan toleransi sebagai salah satu upaya dalam membangun budaya toleransi, pendidikan toleransi yang dilakukan yaitu dengan:

- a. Kesadaran Inklusivisme

Yaitu dengan menggunakan pendekatan agama, pemuka agama mengkaji kembali nilai-nilai yang dirumuskan oleh setiap agama, seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu anggota FKUB di atas yaitu dengan mencari sisi persamaan bahwa setiap agama mengajarkan untuk bersikap toleransi terhadap sesama.

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan bapak Syamsul Ibrahim, 10 Desember 2017

b. Kesadaran Hak Asasi Manusia

Yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis, FKUB memberikan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah karena setiap manusia memiliki kebebasan melaksanakan perintah agama dan pendirian rumah ibadah sebagai sarana dakwah.

2. Temuan terkait dengan peran FKUB Kota Batam dalam menyelesaikan kasus intoleransi adalah peran FKUB dalam menyelesaikan kasus intoleransi tidak serta merta karena adanya perbedaan pandangan mengenai agama satu dan lainnya, permasalahan individu juga seringkali akar mula dari konflik umat beragama, misalnya terjadi permasalahan kriminal, biasanya hingga menyeret-nyeret suatu agama, dan tidak terima dengan hal tersebut maka muncullah konflik antara umat beragama satu dan lainnya, sehingga peran FKUB disini sebagai jembatan koordinasi antara pihak yang berwenang dalam menangani konflik yang timbul.
3. Temuan terkait dengan peran FKUB dalam mempertahankan toleransi umat beragama adalah FKUB sebagai kunci utama dalam hal yang terkait dengan toleransi umat beragama, terutama dalam hal mempertahankan toleransi umat beragama, karena FKUB wadah dalam melakukan dialog-dialog antar pemuka agama, yang nantinya akan berpengaruh kepada setiap umat beragama, dengan kata lain peran FKUB dalam mempertahankan toleransi umat beragama adalah

sebagai model percontohan terhadap umat-umat beragama di Kota Batam, hal tersebut terjadi karena memang pengurus FKUB Kota Batam tidak hanya satu atau dua agama, tetapi terdiri dari seluruh agama yang ada di Kota Batam. Dengan adanya peran FKUB dalam mempertahankan toleransi umat beragama ternyata membawa pengaruh yang besar terhadap stabilitas ekonomi di Kota Batam, karena dengan terjaganya toleransi umat beragama di Kota Batam membuat suasana kota Batam jauh dari konflik antar umat beragama, tentunya hal tersebut membuat investor-investor asing menjadi nyaman.